

**ANALISIS KAUSALITAS ANTARA KINERJA KEUANGAN DAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS
KOTA-KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh:

RINDI INTANIA ANANDA

01021281823073

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

**KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
ANALISIS KAUSALITAS ANTARA KINERJA KEUANGAN DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS KOTA-KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh:

Nama : Rindi Intania Ananda
NIM : 01021281823073
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 22 Juni 2024.....



Ketua : Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS KAUSALITAS ANTARA KINERJA KEUANGAN DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS
KOTA-KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh:

Nama : Rindi Intania Ananda
NIM : 01021281823073
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 12 Juli 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

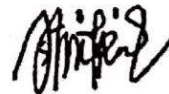
Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 16 Juli 2024

Ketua

Anggota



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI
18-7-2024
JUR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rindi Intania Ananda
NIM : 01021281823073
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Kausalitas Antara Kinerja Keuangan dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Kota-Kota di Provinsi Sumatera Selatan".

Pembimbing : Feny Marissa, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 12 Juli 2024

Adalah benar-benar karya saya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut gelar/ predikat kelulusan saya tersebut.

Palembang, 16 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 18-7-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Rindi Intania Ananda

. NIM. 01021281823073

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kausalitas Antara Kinerja Keuangan dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Kota-Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi, masih terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada didalamnya. Untuk itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan bimbingan, dukungan dan kerja sama dalam kegiatan penulisan skripsi sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.

Palembang, 16 Juli 2024

Penulis,



Rindi Intania Ananda

NIM. 01021281823073

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai hambatan dan rintangan. Namun, hal tersebut berhasil diatasi berkat bimbingan, bantuan, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis selaku hamba-Nya sehingga diberikan kelancaran dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Budi dan Ibu Risna yang senantiasa memberikan doa, kekuatan dan dukungan luar biasa di sepanjang hidup penulis. Terima kasih dengan sepenuh hati penulis ucapkan atas pengorbanan dan dukungan penuh baik moril maupun materil untuk selalu siap mendukung impian dan perjuangan penulis.
3. Kedua adikku tersayang, Satria dan Panji yang telah memberikan waktu, tenaga, doa serta menghibur penulis selama pengerjaan skripsi.
4. Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu, waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada Ibu Feny atas dorongan dan motivasinya sehingga penulis dapat memupuk rasa kepercayaan diri dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji, memberikan ilmu, saran dan masukan konstruktif, serta menyempurnakan skripsi penulis menjadi lebih baik.
6. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, beserta jajarannya.
9. Bapak Drs. Harunurrasyid, M.Com selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
11. *Partner* terbaik, Riska, Nisa, Krisanti, Mia, Yuna, Icin, Audrey, Maya, yang telah bersedia menemani, menyemangati dan membantu penulis terkait skripsi maupun cerita hidup lainnya.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan, doa, dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini.

Palembang, 16 Juli 2024



Rindi Intania Ananda

NIM. 01021281823073

ABSTRAK

ANALISIS KAUSALITAS ANTARA KINERJA KEUANGAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS KOTA-KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Rindi Intania Ananda; Feny Marissa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan kausalitas antara kinerja keuangan dan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dari 4 kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2012 – 2022 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan menerapkan analisis PVAR dan model Kausalitas Granger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD masing-masing memiliki hubungan kausalitas satu arah dengan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, rasio belanja modal dan rasio belanja pegawai masing-masing tidak memiliki hubungan kausalitas dengan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: *Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Belanja Modal, Rasio Belanja Pegawai, Indeks Pembangunan Manusia*

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Pembimbing



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

ABSTRACT

CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX: A CASE OF CITIES IN SOUTH SUMATERA PROVINCE

By:

Rindi Intania Ananda; Feny Marissa

This study aims to analyze the causality relationship between financial performance and Human Development Index. The data used in this research is secondary data in the form of panel from 4 cities in South Sumatera Province during the period 2013 – 2022 that sourced from Directorate General of Financial Balance, Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics. The method in this study used quantitative approach by applying PVAR analysis and Granger's Causality Model. The result showed that the independence ratio and effectiveness ratio of local own-source revenue each have a one-way causal relationship with Human Development Index. Meanwhile, the capital expenditure ratio and employee expenditure ratio each have no causal relationship with Human Development Index.

Keywords: *Financial Performance, Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio of Local Own-Source Revenue, Capital Expenditure Ratio, Employee Expenditure Ratio, Human Development Index*

Acknowledge by,

Head of Development Economic Department

Advisor



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Rindi Intania Ananda
NIM : 01021281823073
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Mata Kuliah : Keuangan Daerah
Judul Skripsi : Analisis Kausalitas Antara Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Kota-Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk di tempatkan pada lembar abstrak.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Pembimbing



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
	Nama	Rindi Intania Ananda
	NIM	01021282823073
	Tempat/Tanggal Lahir	Palembang, 02 September 2000
	Alamat	Jl. Irigasi Lr. Sehat No.3249, RT. 56 RW.15, Pakjo Palembang
	Handphone	081278975097
Agama	Islam	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Status	Belum Menikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Email	Rindintaniaa02@gmail.com	
PENDIDIKAN FORMAL		
2006 - 2012	SDN 26 Palembang	
2012 – 2015	SMPN 22 Palembang	
2015 - 2018	SMAN 11 Palembang	
2018 - 2024	S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Transfer	15
2.1.2 Teori Federalisme Fiskal	20
2.2 Definisi dan Konsep	21

2.2.1 Desentralisasi Fiskal.....	21
2.2.2 Otonomi Daerah.....	23
2.2.3 Kinerja Keuangan Daerah	25
2.2.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	27
2.2.5 Rasio Efektivitas PAD.....	29
2.2.6 Rasio Belanja Modal.....	30
2.2.7 Rasio Belanja Pegawai.....	31
2.2.8 Indeks Pembangunan Manusia	32
2.3 Penelitian Terdahulu.....	36
2.4 Kerangka Pikir	38
2.5 Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	41
3.2 Jenis dan Sumber Data	41
3.3 Teknik Analisis Data	41
3.3.1 Uji Stasioner Data	42
3.3.2 Uji Lag Optimum	42
3.3.3 Uji Stabilitas VAR.....	43
3.3.4 Uji Kausalitas Granger.....	43
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.1.1 Kondisi Geografis di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan.....	49
4.2 Gambaran Umum Variabel.....	52
4.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan	52
4.2.2 Rasio Efektivitas PAD di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan	54
4.2.3 Rasio Belanja Modal di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan	56

4.2.4 Rasio Belanja Pegawai di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan	57
4.2.5 Indeks Pembangunan Manusia di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan.....	58
4.3 Hasil dan Analisis Penelitian.....	60
4.3.1 Uji Stasioner (Unit Root Test).....	60
4.3.2 Penentuan Lag Optimum.....	65
4.3.3 Uji Stabilitas VAR.....	67
4.3.4 Uji Kausalitas Granger.....	69
4.4 Pembahasan	71
4.4.1 Kausalitas Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia.....	71
4.4.2 Kausalitas Rasio Efektivitas PAD dan Indeks Pembangunan Manusia.....	75
4.4.3 Kausalitas Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia.....	78
4.4.4 Kausalitas Rasio Belanja Pegawai dan Indeks Pembangunan Manusia.....	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
DAFTAR LAMPIRAN.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Transfer Daerah Pada APBN Indonesia Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah).....	2
Gambar 1.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 (Persen).....	10
Gambar 2.1	Kurva Transfer Matching <i>Open-Ended Grant</i>	16
Gambar 2.2	Kurva Transfer Matching <i>Close-Ended Grant</i>	17
Gambar 2.3	Kurva Transfer <i>Non-Matching Grant</i>	18
Gambar 2.4	Kurva Transfer <i>Unconditional Grant</i>	19
Gambar 2.5	Kerangka Pikir.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kinerja Keuangan Daerah di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 (Persen)	6
Tabel 2.1	Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah	29
Tabel 2.2	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	30
Tabel 4.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2022 (Persen)	52
Tabel 4.2	Rasio Efektivitas PAD di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2022 (Persen).....	54
Tabel 4.3	Rasio Belanja Modal di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2022 (Persen).....	56
Tabel 4.4	Rasio Belanja Pegawai di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2022 (Persen).....	57
Tabel 4.5	Indeks Pembangunan Manusia di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2022 (Persen)	59
Tabel 4.6	Uji Stasioner <i>ADF-Fisher Chi-Square</i> Tingkat Derajat Level Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia	60
Tabel 4.7	Uji Stasioner <i>ADF-Fisher Chi-Square</i> Tingkat Derajat First Difference Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia	61
Tabel 4.8	Uji Stasioner <i>ADF-Fisher Chi-Square</i> Tingkat Derajat Second Difference Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia	61
Tabel 4.9	Uji Stasioner <i>ADF-Fisher Chi-Square</i> Tingkat Derajat Level Rasio Efektivitas PAD dan Indeks Pembangunan Manusia.....	62
Tabel 4.10	Uji Stasioner <i>ADF-Fisher Chi-Square</i> Tingkat Derajat First Difference Rasio Efektivitas PAD dan Indeks Pembangunan Manusia	62
Tabel 4.11	Uji Stasioner <i>ADF-Fisher Chi-Square</i> Tingkat Derajat Level Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia	63

Tabel 4.12	Uji Stasioner <i>ADF-Fisher Chi-Square</i> Tingkat Derajat First Difference Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia	63
Tabel 4.13	Uji Stasioner <i>ADF-Fisher Chi-Square</i> Tingkat Derajat Second Difference Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia	64
Tabel 4.14	Uji Stasioner <i>ADF-Fisher Chi-Square</i> Tingkat Derajat Level Rasio Belanja Pegawai dan Indeks Pembangunan Manusia	64
Tabel 4.15	Uji Stasioner <i>ADF-Fisher Chi-Square</i> Tingkat Derajat First Difference Rasio Belanja Pegawai dan Indeks Pembangunan Manusia	65
Tabel 4.16	Penentuan Lag Optimum Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia.....	66
Tabel 4.17	Penentuan Lag Optimum Rasio Efektivitas PAD dan Indeks Pembangunan Manusia	66
Tabel 4.18	Penentuan Lag Optimum Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia	66
Tabel 4.19	Penentuan Lag Optimum Rasio Belanja Pegawai dan Indeks Pembangunan Manusia	67
Tabel 4.20	Uji Stabilitas VAR Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia	67
Tabel 4.21	Uji Stabilitas VAR Rasio Efektivitas PAD dan Indeks Pembangunan Manusia	68
Tabel 4.22	Uji Stabilitas VAR Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia	68
Tabel 4.23	Uji Stabilitas VAR Rasio Belanja Pegawai dan Indeks Pembangunan Manusia	69
Tabel 4.24	Uji Kausalitas Granger Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia.....	69
Tabel 4.25	Uji Kausalitas Granger Rasio Efektivitas PAD dan Indeks Pembangunan Manusia	70
Tabel 4.26	Uji Kausalitas Granger Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia	70

Tabel 4.27 Uji Kausalitas Granger Rasio Belanja Pegawai dan Indeks Pembangunan Manusia	71
----------------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rasio Kemandirian di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013–2022 (Persen)	97
Lampiran 2	Rasio Efektivitas PAD di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013–2022 (Persen)	97
Lampiran 3	Rasio Belanja Modal di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013–2022 (Persen)	98
Lampiran 4	Rasio Belanja Pegawai di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013–2022 (Persen)	98
Lampiran 5	Indeks Pembangunan Manusia di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013–2022 (Persen)	98
Lampiran 6	Data Panel.....	99
Lampiran 7	Output Eviews <i>Uji Stasioner ADF-Fisher Chi-Square</i>	100
Lampiran 8	Output Eviews Penentuan Lag Optimum	106
Lampiran 9	Output Eviews Uji Stabilitas Panel VAR.....	108
Lampiran 10	Output Eviews Uji Kausalitas Granger	110

BAB I

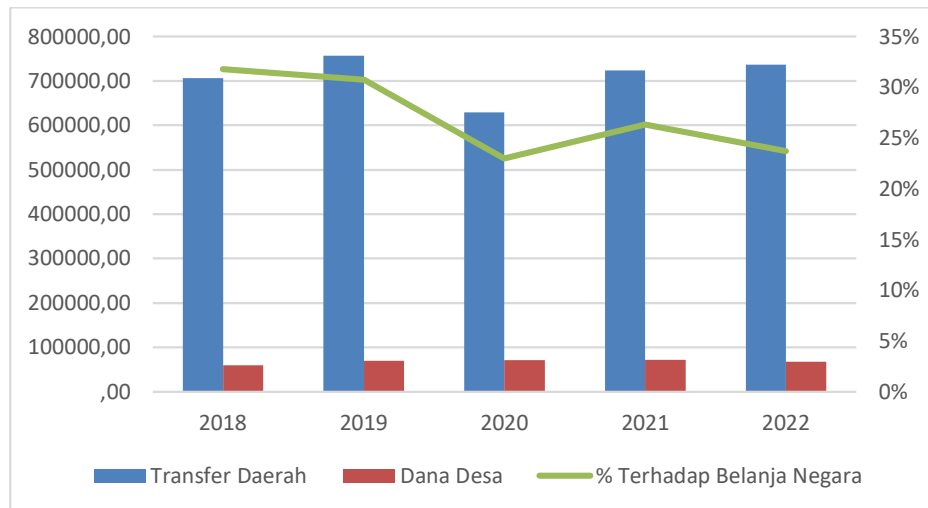
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca penerapan desentralisasi fiskal pada tahun 1999, pemerintah terus melakukan perbaikan dalam rangka pelimpahan anggaran dan kewenangan untuk percepatan tujuan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mencapai otonomi daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan otonomi daerah memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber potensial yang dimiliki masing-masing daerah agar dapat menciptakan kemandirian daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional (Christianingrum & Aida, 2020). Otonomi daerah menjadikan anggaran kepada pemerintah daerah sebagai pintu penting untuk kegiatan pembangunan melalui alokasi yang tepat dalam rangka membuat strategi untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sesuai prioritas kebutuhan daerah (Simanjuntak, 2015).

Salah satu alokasi dana pemerintah yang perlu diperhatikan adalah anggaran transfer ke daerah. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY. Banyaknya jumlah transfer ke daerah ini cukup signifikan, sebagai akibat dari pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, setelah

pelaksanaan desentralisasi fiskal. Perkembangan Transfer Daerah Pada APBN di Indonesia Tahun 2018-2022 dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Perkembangan Transfer Daerah Pada APBN Indonesia Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

Berdasarkan Gambar 1.1, Transfer Daerah pada APBN Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp706,1 triliun atau 32 persen dari pagu anggaran hingga mencapai Rp736,7 triliun atau 24 persen dari pagu anggaran pada tahun 2022, namun perkembangan setiap tahunnya berfluktuasi. Kenaikan transfer daerah ini guna mempercepat program-program pembangunan daerah, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan transfer daerah.

Kebijakan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur transfer daerah menjadi relevan dan penting karena terkait dengan dampak perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di setiap tahunnya (Iqbal et al., 2021).

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangan-undangan selama satu periode anggaran (Machmud, 2014). Pengukuran kinerja keuangan daerah memerlukan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan daerah dalam menjalankan dan membiayai pemerintahannya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan APBD (Mardiasmo, 2012). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diantaranya adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal dan rasio belanja pegawai.

Rasio keuangan daerah menunjukkan hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kinerja keuangan daerah yang baik akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia. Badan Pusat Statistik (2022) memaparkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah melalui penyediaan layanan publik yang baik adalah Indeks Pembangunan Manusia. Anggraini (2015) memaparkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa dampak yang baik pula bagi tersedianya layanan publik. Dengan layanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat yang digambarkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Rasio kemandirian keuangan daerah memberikan informasi terkait kapabilitas pemerintah daerah untuk membiayai sendiri setiap aktivitas pemerintahannya termasuk pembangunan maupun penyediaan layanan publik yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. F. N. G. Sari & Riharjo (2020) mengemukakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dapat diartikan bahwasanya ketika rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat yang tinggi, maka suatu daerah akan semakin berpotensi dalam rangka penyediaan layanan publik yang maksimal, sehingga tingkat Indeks Pembangunan Manusia dapat tercapai sesuai dengan target terbaiknya.

Rasio efektivitas PAD mencerminkan kapabilitas pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD yang telah direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil di wilayah tersebut. Taslim & Pratama (2021) menyebutkan bahwa kinerja keuangan daerah dari rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Adanya peningkatan pada rasio efektivitas PAD tentunya diharapkan dapat mendukung ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, dengan tujuan mencapai tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi.

Rasio belanja modal merupakan perbandingan dari total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah secara keseluruhan pada suatu daerah. Rasio ini memberikan gambaran mengenai pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada masyarakat umum, sehingga nantinya

dapat membawa dampak yang baik dalam rangka peningkatan kualitas hidup, standar hidup yang layak maupun kesejahteraan masyarakat. Siregar (2023) mengemukakan bahwa rasio belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Rasio belanja pegawai adalah perbandingan antara realisasi belanja pegawai dengan total belanja daerah untuk mengukur seberapa banyak pemerintah membayar pegawai negerinya. Murthahar et al. (2021) mengungkapkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketika rasio belanja pegawai mengalami peningkatan yang maksimal, maka dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik dan juga pencapaian tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Provinsi Sumatera Selatan memperoleh penghargaan “Wajar Tanpa Pengecualian” atau WTP untuk penyajian dan pelaporan keuangan berturut-turut sejak tahun 2013 hingga tahun 2022 yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Provinsi Sumatera Selatan semakin membaik. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis kinerja keuangan kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah dan belum merata. Penerimaan pendapatan pada pemerintah kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan masih didominasi oleh peranan pemerintah pusat berupa pendapatan transfer dibandingkan kemampuan daerahnya sendiri dalam menggali potensi sumber-sumber PAD. Pemerintah

daerah kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam pemungutan PAD untuk menghasilkan output atau hasil, serta menunjukkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Padahal dalam perokonomian kota di Provinsi Sumatera Selatan meliputi berbagai sektor seperti perdagangan/hotel/restoran, telekomunikasi, transportasi, dan industri pengolahan yang dapat meningkatkan PAD (Wellyan et al., 2023). Kinerja keuangan daerah di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 dapat ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Daerah di Kota-Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 (Persen)

Tahun	Kota	Rasio Kemandirian	Rasio Efektivitas PAD	Rasio Belanja Modal	Rasio Belanja Pegawai
2018	Palembang	37,64	90,31	24,41	43,57
	Prabumulih	10,48	79,71	14,05	39,57
	Pagar Alam	10,58	118,51	14,12	43,68
	Lubuk Linggau	12,91	91,90	24,41	42,65
2019	Palembang	37,20	65,42	28,12	38,17
	Prabumulih	9,02	104,64	26,50	33,24
	Pagar Alam	7,69	135,25	26,68	32,82
	Lubuk Linggau	10,87	109,67	26,94	38,61
2020	Palembang	38,78	55,98	24,02	40,20
	Prabumulih	9,58	80,47	20,94	36,58
	Pagar Alam	11,47	134,88	30,91	31,43
	Lubuk Linggau	9,18	88,05	32,81	33,87
2021	Palembang	45,77	74,51	22,52	39,54
	Prabumulih	8,70	69,25	17,90	47,62
	Pagar Alam	8,17	102,14	24,55	38,54
	Lubuk Linggau	15,67	118,75	34,94	36,52
2022	Palembang	52,98	105,34	27,61	36,37
	Prabumulih	10,52	74,13	16,92	45,75
	Pagar Alam	7,76	130,77	32,22	32,87
	Lubuk Linggau	9,93	82,74	36,82	30,89

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK Kemenkeu), diolah.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah pada kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah selama periode tahun 2018-2022 cenderung mengalami fluktuasi dan menunjukkan hasil yang belum optimal dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini disebabkan oleh penerimaan PAD yang tidak lebih besar dibandingkan penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dan pinjaman. Rasio kemandirian daerah Kota Palembang lebih menonjol dibandingkan kota-kota lainnya dengan rata-rata sebesar 42,48 persen. Pada tahun 2018 tingkat kemandirian Kota Palembang sebesar 37,64 persen meningkat hingga mencapai persentase tertinggi sebesar 52,98 persen pada tahun 2022. Rasio kemandirian keuangan daerah terendah adalah Kota Pagar Alam dengan rata-rata sebesar 9,13 persen dan persentase rasio terendah pada tahun 2022 sebesar 7,76 persen dan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,47 persen.

Rasio efektivitas PAD kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018-2022 cenderung berfluktuasi di setiap tahunnya, namun menunjukkan hasil yang cukup efektif karena hampir seluruh kota memperlihatkan rata-rata rasionya melebihi 80 persen atau memenuhi kriteria cukup efektif. Kinerja keuangan Kota Pagar Alam memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif dengan rata-rata sebesar 124,31 persen selama periode lima tahun dalam merealisasikan PAD dengan angka tertinggi diperoleh pada tahun 2019 sebesar 135,25 persen. Rasio efektivitas PAD yang paling rendah atau tidak efektif adalah Kota Palembang dengan perolehan rata-rata rasio sebesar 78,31 persen dan angka rasio tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 105,34 persen. Banyaknya PAD yang dihasilkan

Kota Palembang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan kota tersebut.

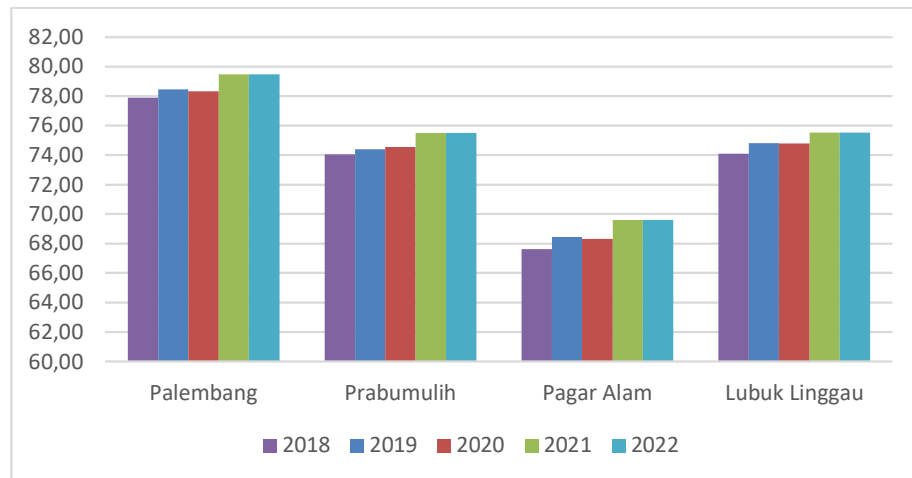
Rasio belanja modal di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2018-2022 cenderung mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, rasio belanja modal pada kota Lubuk Linggau memperoleh persentase tertinggi dibandingkan kota-kota lainnya dengan rata-rata sebesar 31,18 persen, pada tahun 2018 sebesar 24,41 persen dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 36,82 persen, artinya Kota Lubuk Linggau lebih mengutamakan pemenuhan pembangunan untuk daerahnya. Rasio belanja modal yang memperoleh persentase terendah yaitu Kota Prabumulih dengan rata-rata sebesar 19,26 persen.

Rasio belanja pegawai selama periode 2018 hingga 2022 di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi. Rasio belanja pegawai dengan persentase tertinggi diperoleh oleh Kota Prabumulih dengan rata-rata sebesar 40,55 persen selama rentang waktu lima tahun. Disusul oleh kota Palembang dengan rata-rata sebesar 39,57 persen, Kota Lubuk Linggau sebesar 36,51 persen, dan Kota Pagar Alam sebesar 36,51 persen. Rasio belanja pegawai mendominasi alokasi belanja daerah untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan alih-alih rasio belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa analisis kinerja keuangan pemerintah daerah yang efektif dan efisien menjadi suatu sumber atau pedoman penting dalam rangka merumuskan setiap kebijakan dalam pengelolaan daerah (Norsain & Roflik, 2022). Diperlukan adanya kesinambungan antara

keberhasilan pencapaian tujuan pemerintah daerah dengan kinerja keuangan daerah. Semakin baik capaian kinerja keuangan pemerintah daerah seharusnya berdampak positif bagi keberhasilan program pemerintah daerah yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Anggraini, 2015).

Badan Pusat Statistik (2021) memaparkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah berasal dari pengadaan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui data Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit atau gabungan yang berguna dalam pengukuran pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup manusia yakni dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan dimensi kehidupan yang layak tercermin dalam kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar, seperti rata-rata pengeluaran per kapita, yang dianggap sebagai pendekatan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang layak. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 dapat disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan

Berdasarkan Gambar 1.2, Indeks Pembangunan Manusia jika ditinjau menurut kota-kota dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan capaian nilai yang secara bertahap semakin meningkat. Secara level, Indeks Pembangunan Manusia yang berada di kategori tinggi dicapai oleh Kota Palembang, Lubuk Linggau dan Prabumulih. Indeks Pembangunan Manusia terendah yaitu Kota Pagar Alam yang setiap tahunnya masih berada di kategori sedang.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang memiliki persentase tertinggi dengan rata-rata sebesar 78,72 persen selama tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Palembang memperoleh angka sebesar 77,89 persen meningkat hingga mencapai 79,47 persen pada tahun 2022. Indeks Pembangunan Manusia terendah yaitu kota Pagar Alam dengan rata-rata sebesar 68,71 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 67,62 persen menjadi 69,60 persen pada tahun 2022. Meskipun tidak mengalami peningkatan yang cukup besar, namun peningkatan bertahap setiap tahunnya ini

menunjukkan bahwa kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna peningkatan pembangunan dari tahun ke tahun melalui program-program pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu daerah. Daerah dengan kualitas hidup manusia yang tinggi akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi lokal dengan menarik minat masyarakat untuk berinvestasi dan meningkatkan daya tarik ekonomi lokal sehingga kinerja keuangan daerah akan semakin baik dan terukur serta menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan (Pamungkas, 2013).

Menurut Bolivar et al. (2016) sumber daya manusia berkualitas yang dilihat dari indikator pendidikan yaitu memiliki kualitas pendidikan lebih tinggi dapat memberikan kontribusi yang baik dan positif terhadap kelangsungan keuangan pemerintah daerah dalam periode waktu yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung kritis dalam hal realisasi keuangan di daerahnya, sehingga hal tersebut menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih intens terhadap penyediaan informasi-informasi khususnya kinerja keuangan agar lebih transparan.

Sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi dari segi latar belakang pendidikan, sumber daya manusia yang setidaknya aktif berpartisipasi dalam pelatihan serta pengalaman-pengalaman lainnya dapat meningkatkan kinerja keuangan karena terdorong untuk selalu bekerja secara efektif, efisien dan produktif sekaligus dapat meminimalisir adanya tingkat kesalahan dalam

menyelesaikan pekerjaan sehingga lebih mampu mengelola keuangan daerah (Riawan, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2013) mengemukakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas PAD. Kemudian Karamoy & Poputra (2014) dan Tabroni (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah namun tidak berpengaruh signifikan pada penelitian yang dilakukan oleh Budiwati (2020). Sementara itu, penelitian yang dilakukan Riphath et al. (2016) menyatakan bahwa sebagian besar kinerja keuangan tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan Indeks Pembangunan Manusia, kecuali pada beberapa *proxy* tertentu di beberapa provinsi yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas.

Banyak penelitian yang membahas determinan dari Indeks Pembangunan Manusia begitu juga hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan kinerja ekonomi. Namun, penelitian yang membahas hubungan kausalitas antara kinerja keuangan pemerintahan daerah dan Indeks Pembangunan Manusia masih jarang dilakukan sehingga menarik minat penulis untuk melakukan penelitian secara statistik untuk menganalisis hubungan kausalitas antara kinerja keuangan dan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, untuk memahami sejauh mana kedua variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan kausalitas antara Kinerja Keuangan dan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kausalitas antara Kinerja Keuangan dan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang hubungan kausalitas antara Kinerja Keuangan dan Indeks Pembangunan Manusia di kota-kota Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya dan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi pengembangan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan untuk dapat lebih memahami mengenai hubungan kausalitas antara Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia

b) Bagi pengambilan kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan untuk merancang serta merencanakan kebijakan pengelolaan keuangan yang tepat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Samarrai, S., & Lewis, B. (2021). *The Role of Intergovernmental Fiscal Transfers in Improving Education Outcomes* (S. Al-Samarrai & B. Lewis (eds.)). The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1693-2>
- Alam, K. Z. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi pada Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(2).
- Anggraini, T. (2015). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 18*.
- Ariyati, N., Rahayu, F., Amalia, N. R., Nurhaliza, S., Ghufrani, T. M., Adi, A. R., & Jalaluddin. (2018). Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia: Panel Data Evidence Empat Kabupaten di Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 92–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.465>
- Azwandi, Wibisono, C., Indrawan, M. G., Satriawan, B., & Khaddafi, M. (2022). The Effect of Financial Performance on The Human Development Index Moderated Economic Growth in Regency/City in The Province of Riau Island. *International Journal of Educational Review, Law, and Social Science (IRJELAS)*, 2(5), 633–650. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/ijerlas.v2i5.371>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Pembangunan Manusia. In *Indeks Pembangunan Manusia*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2022a). *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2022*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2022b). *Indeks Pembangunan Manusia*.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2015). *Ekonometrika (Teori dan Aplikasi)*. Mitra Pustaka Nurani (matan).
- Bolivar, M. P. R., Galera, A. N., Munoz, L. A., & Subires, M. D. L. (2016). Risk Factors and Drivers of Financial Sustainability in Local Government: An Empirical Study. *Local Government Studies*, 42(1), 29–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1061506>
- Budiwati, R. L. D. (2020). *Pengaruh PDRB dan IPM terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Dana Alokasi Umum sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Pulau Jawa Periode 2016-2017)*. Universitas Teknologi

Yogyakarta.

- Christianingrum, R., & Aida, A. N. (2020). The Analysis of Provincial Financial Capacity Mapping Before and After Autonomy Regional. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2), 18–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i2.98>
- Deswanto, D. B., Asniar Ismail, & Hendarmin. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 6(3), 187–210. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256>
- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. Y. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- DJPK Kemenkeu RI. (2011). *Deskripsi dan Analisis APBD TA 2011*.
- E.Stiglitz, J. (2016). Inequality and Economic Growth. *The Political Quarterly*, 86(1), 134–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-923X.12237>
- Gohung, G. S., Masinambow, V. A. ., & Siwu, H. F. D. (2023). Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi*, 23(3), 97–108.
- Gujarati, N. D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Buku 2 Edisi). Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Hamimah, & Zulkarnain. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap IPM Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *REKAN: Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(2), 11–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.922>
- Handayani, R., Soleh, A., Santoso, A., & Rahayu, Y. (2022). Analisis Kausalitas Belanja Modal, Bantuan Sosial, dan Indeks Pembangunan Manusia. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 264–269. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v7i1.368>
- Hastuti, P. (2018). *Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Imanulloh, D. W. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan

- Pendapatan Per Kapitaa Terhadap IPM Studi Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(2), 1–17.
- Indramawan, D. (2018). The Impact Of Financial Performance Of Local Government On Human Development Index In Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1247–1272.
- Iqbal, M., Rachman, D. H. D., & Siti Rodiah. (2021). Pengaruh Rencana APBD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 18–34.
- Karamoy, H., & Poputra, A. T. (2014). Analisis Panel Atas Pengaruh Ekonomi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 12–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.9.4.6365.2014>
- Kartika, M. (2015). Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBK)*, 4(1), 45–71. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11461>
- Khanal, G. K. (2018). Fiscal Decentralization and Human Poverty in Nepal: A Causal Analysis. *Journal of Management and Development Studies*, 28, 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3126/jmds.v28i0.24955>
- Kreuta, B., Atmaja, D. D., & Riani, I. A. P. (2020). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Papua Tahun 2012-2016. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 7(3), 82–95. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.56076/jkesp.v7i3.2182>
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1–13.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Ke-4). UPP STIK YKPN Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Edisi Ke-4). BPFE.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (3rd ed.). CV. Andi Offset.
- Marihot, N. (2019). Faktor Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 4(1), 121–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jurnalbudget.v4i1>
- Munfarida, S., & Priyoadmiko, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,

- Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *AMAR (Andalas Management Review)*, 4(2), 46–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/amar.4.2.46-59.2020>
- Murthahar, L. O. M., Tenge, E., & Sading, Y. (2021). Pengaruh Belanja Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2017. *KATALOGIS*, 9(3), 303–317.
- Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1, 120–134. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134>
- Norsain, N., & Roflik, M. (2022). Apakah Kinerja Keuangan Daerah Menggambarkan Kemiskinan di Jawa Timur. *Media Mahardhika*, 20(2), 405–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/mahardhika.v20i1.354>
- Pamungkas, B. (2013). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Universitas Sebelas Maret.
- Prayoga, F., & Ananda, C. F. (2023). Rethinking of Local Autonomy and Fiscal Decentralization Policy: Can it Improve The Quality of Human Capital? A Case in Eastern Region of Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 11(2), 129–145. <https://doi.org/doi.org/10.21776/ub.jiae.2023.011.02.2>
- Priambodo, A., & Noor, I. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2), 1–16.
- Ramadhan, A. V. G., & Setiawati, E. (2022). The Effect of Regional Government's Finance Ratio to Human Development Index of Provincial Government in Indonesia. *Prosiding University Research Colloquium*, 325–335. <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2084>
- Riawan. (2016). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Dengan SIMDA Pada SKPD Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8(1), 50–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um002v8i12016p050>
- Riphat, S., Setiawan, H., & Damayanty, S. A. (2016). Causality Analysis Between Financial Performance and Human Development Index: Case Study Of Provinces In Eastern Indonesia. *KEK: Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3), 231–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.31685/kek.v20i3.195>

- Runtuuwu, P. C. H. (2023). Apakah Pengeluaran Pemerintah Berdampak Terhadap Pembangunan Ekonomi? *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2532–2544. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25832>
- S. Rosen, H., & Gayer, T. (2010). *Public Finance* (9th editio). McGraw-Hill International Editions.
- Saputro, N. R. (2023). *Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pendidikan dan Teknologi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2020)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sari, F. N. G., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Timur. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 230–237.
- Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2409–2438.
- Sari, Y., Winarni, E., & Amali, M. (2021). Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 565–571. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.415>
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1), 1–12.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/economia.v9i1.1373>
- Shah, A. (2006). A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. *Revista de Economía y Estadística*, 44(2), 127–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.55444/2451.7321.2006.v44.n2.4088>
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>
- Siregar, H. A. (2023). Aspek Kinerja Keuangan Daerah yang Berdampak Pada Pembangunan Manusia di Daerah Pemekaran. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(2), 157–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jae.v13i2.5530>
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam

- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Tabroni. (2022). *Analisis Pengaruh Belanja Modal, PDRB dan IPM Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di 8 Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2018*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Tahawa, T. H. B., Nurhidayah, Erwin, & Khaldun, R. I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan, Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2013-2018. *MANDAR: Management and Applied Research Journal*, 2(2), 41–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.15958>
- Taslim, F. A., & Pratama, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 528–538. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i2.647>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi 11 J). Erlangga.
- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik* (Edisi 2). PT RajaGrafindo Persada.
- Wellyan, V. R., Noviana, E., & Lisdiana. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(3), 216–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i3.2456>
- Widadari, K., Rares, J. J., & Dengo, S. (2017). Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(44), 1–14.
- Widiagama, A. P. (2015). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Universitas Jember.